

PEMBATALAN PERJANJIAN ANTARA PERSEMAMURAN AUSTRALIA DENGAN TIONGKOK DALAM KERJASAMA BELT AND ROAD INITIATIVE (BRI) PADA TAHUN 2021

Dede Andriana Ramdan¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the Commonwealth of Australia's reasons for canceling the *Belt and Road Initiative* (BRI) cooperation agreement in 2021. The problem of this research stemmed from the participation of the state of Victoria in agreeing on a memorandum of understanding on the BRI cooperation agreement with China in the midst of Australia's efforts to suppress China's influence in the Indo-Pacific region. The Commonwealth Government of Australia took steps to create a new Foreign Relations Act to cancel the BRI cooperation carried out by the State of Victoria. This cancellation is the foreign policy of the Australian Federal Government to protect its national interests, especially in the Indo-Pacific region. Qualitative and analytical descriptive methods are the research methods used in this Thesis. The data collection technique is carried out through literature studies by searching for data derived from books, articles in journals, official documents and news articles. With the help of Foreign Policy Theory and the Concept of National Interest, it can explain the factors behind Australia's cancellation of the BRI cooperation agreement last year. First, Australia's security priorities. Second, Australia's involvement in the *Blue Dot Network* (BDN). Third, the threat of the Chinese military.

Keywords: *Belt and Road Initiative*, *Blue Dot Network*, Australia, China, Victoria, Security, National Interest, Foreign Policy

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan Persemakmuran Australia dalam pembatalan perjanjian kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI) tahun 2021. Masalah penelitian ini bermula dari keikutsertaan negara bagian Victoria menyepakati nota kesepahamn perjanjian kerjasama BRI dengan Tiongkok di tengah upaya Australia untuk menekan pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Persemakmuran Australia mengambil langkah membuat Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang baru untuk membatalkan kerjasama BRI yang dilakukan oleh Negara Bagian Victoria. Pembatalan ini sebagai kebijakan luar negeri Pemerintah Federal Australia untuk melindungi kepentingan nasionalnya terutama di kawasan Indo- Pasifik. Metode kualitatif dan deskriptif analitis menjadi metode penelitian yang digunakan dalam Tesis ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mencari data yang berasal dari buku, artikel dalam jurnal, dokumen resmi dan artikel berita. Melalui bantuan Teori Kebijakan Luar Negeri dan Konsep Kepentingan Nasional dapat menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi pembatalan Australia terhadap perjanjian kerjasama BRI tahun. Pertama, prioritas keamanan Australia. Kedua, keterlibatan Australia dalam *Blue Dot Network* (BDN). Ketiga, ancaman militer Tiongkok.

Kata Kunci: *Belt and Road Initiative*, *Blue Dot Network*, Australia, Tiongkok, Victoria, Keamanan, Kepentingan Nasional, Kebijakan Luar Negeri

PENDAHULUAN

Belt and Road Initiative (BRI) merupakan strategi ekonomi Tiongkok untuk menjadi hegemoni ekonomi dunia dengan mengintegrasikan pasar melalui jalur darat dan jalur maritim. (Aoyama 2017) BRI yang sebelumnya disebut One Belt One Road (OBOR) pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada akhir 2013 di Kazakhstan dan Indonesia (Chun 2010). BRI dibagi menjadi dua komponen, yaitu Silk Road Economic Belt (SREB) dan Maritime Silk Road (MSR). Komponen-komponen ini digunakan sesuai dengan kepentingan Tiongkok terhadap suatu negara yang terlibat dalam proyek BRI (Chun 2010). Perubahan nama dari OBOR menjadi BRI dimaksudkan untuk menghapus stigma negatif tentang Tiongkok dan mempermudah Tiongkok untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara di kawasan. Saat ini, terdapat lebih dari 60 negara ikut berpartisipasi dalam proyek BRI. Tiongkok melalui BRI akan bekerjasama dengan negara-negara partisipan membangun infrastruktur seperti jaringan telekomunikasi, jalur pipa minyak dan gas, jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan, pendidikan, serta kesehatan.

Tiongkok membentuk enam koridor internasional dan jalur sutra maritim untuk menjalankan misi BRI. Enam koridor tersebut di antaranya; (a) *Tiongkok – Mongolia – Russia Economic Corridor*; (b) *New Eurasia Land Bridge (Second Eurasia Land Bridge) Economic Corridor*; (c) *China – Central Asia – West Asia Economic Corridor*; (d) *China – Indochina Peninsula Economic Corridor*; (e) *China – Pakistan Economic Corridor*; (f) *Bangladesh-China- Myanmar Economic Corridor*. Jalur Sutra Maritim memiliki rute dari Laut Cina Selatan dan Samudera Hindia ke Eropa dan Afrika, dan rute dari Selatan ke Pasifik Selatan.

Dalam rangka memperluas koridor BRI, China mengundang negara-negara yang berada di luar koridor tersebut, salah satunya Australia. Pada 8 November 2014, Presiden Xi melalui pidatonya secara formal mengundang Parlemen Australia untuk berpartisipasi dalam BRI. China juga menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan pemerintah Australia pada Maret 2018 untuk mengajak Australia berpartisipasi dalam BRI sebagai bagian dari *Comprehensive Strategic Partnership* antara China dan Australia. Salah satu prasyarat berpartisipasi dalam BRI adalah Australia diharuskan menandatangani perjanjian bilateral dengan China sebagai komitmen keberpihakannya secara penuh pada BRI. Australia harus mendukung kepentingan-kepentingan China dan terlibat secara diplomatis dalam upaya menyukseskan proyek-proyek BRI. Berdasarkan ketentuan tersebut, Australia enggan menyatakan keberpihakannya dan tidak menandatangani perjanjian bilateral tersebut. Berbeda dengan keputusan Pemerintah Federal Australia, Victoria sebagai salah satu negara bagian Australia justru mengambil keputusan untuk berpartisipasi dalam BRI. Keikutsertaan Victoria dalam proyek BRI merupakan bagian dari perjalanan panjang hubungan baik Victoria dan China. Sejak 2014, perdagangan dua arah antara Victoria dan China memberikan peningkatan ekspor sebesar 60% dengan total USD30,7 miliar. Tanpa persetujuan Canberra, Victoria secara resmi menandatangani *Memorandum of Understanding Between The Government of The State of Victoria of Australia and The National Development and Reform Commission The People's Republic of China on Cooperation Within The Framework of The Silk Road Economic Belt and The 21st Century Maritime Silk Road Initiative* pada 2018. (Varano 2020).

Victoria juga menandatangani *Framework Agreement Between The Government of The State of Victoria of Australia and The National Development and Reform Commission The People's Republic of China on Jointly Promoting The Silk Road Economic Belt and The 21st Century Maritime Silk Road Initiative* pada 2019. Victoria menjadi satu-satunya negara bagian Australia yang secara resmi terlibat langsung dalam kerjasama BRI. Keikutsertaan Victoria dalam proyek BRI menjadi kontroversial, sebab Australia sudah secara resmi menandatangani kerjasama Blue Dot Network (BDN) dengan Amerika Serikat dan Jepang.

BDN adalah sebuah inisiatif multi-sektor untuk menyatukan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk pengembangan infrastruktur dengan standar kualitas tinggi. BDN dapat dikatakan sebagai proyek alternatif Australia untuk menekan pengaruh China terutama di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya, pada akhir 2020 pemerintah Australia memperkenalkan *Australia's Foreign Relations (State and Territory Arrangements) Act 2020* yang memungkinkan batalnya perjanjian otoritas negara dengan entitas asing yang dianggap mengganggu kepentingan nasional Australia. Dengan hadirnya undang-undang baru ini, Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, mengatakan lebih dari 1.000 perjanjian antara negara bagian dan teritori Australia dengan entitas asing telah dievaluasi oleh Pemerintah Federal Australia.

Berdasarkan undang-undang hubungan luar negeri yang baru, ada empat perjanjian bilateral yang dibatalkan karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan nasional Australia. Dua di antaranya adalah perjanjian Victoria dengan China, yakni "*Memorandum of Understanding Between The Government of The State of Victoria of Australia and The National Development and Reform Commission The People's Republic of China on Cooperation Within The Framework of The Silk Road Economic Belt and The 21st Century Maritime Silk Road Initiative*" dan "*Framework Agreement Between The Government of The State of Victoria of Australia and The National Development and Reform Commission The People's Republic of China on Jointly Promoting The Silk Road Economic Belt and The 21st Century Maritime Silk Road Initiative*".

Pembatalan yang dilakukan Australia terhadap dua perjanjian kerjasama proyek BRI Victoria dan China menjadi anomali melihat di kerjasama sebelumnya Victoria mengalami surplus USD30,7 miliar. Hal ini menjadi menarik untuk melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi Australia membatalkan dua perjanjian kerjasama BRI dengan China.

KERANGKA ANALITIK

Neorealisme adalah salah satu perspektif utama dalam kajian teori-teori Hubungan Internasional kontemporer, Neorealisme muncul sebagai kritik atas asumsi dasar realisme yang menganggap sifat dasar manusia (*human nature*) sebagai penjelasan atas berbagai perebutan kekuasaan dalam hubungan internasional (Mearsheimer 2011). Neorealisme justru menganggap desain dari struktur internasional adalah anarki. Hal ini bisa ditandai dengan tidak adanya otoritas atau organisasi internasional yang bisa mengatur relasi antara negara. Dalam kondisi anarki, potensi suatu negara untuk menyerang atau diserang oleh negara lain tidak dapat diprediksi. Kondisi ketidakpastian yang dialami setiap negara dalam politik internasional tersebut yang menyebabkan setiap negara berusaha untuk mencapai kapabilitas keamanan (*security*) dan/atau kekuatan (*power*) semaksimal mungkin (Visensio R 2016).

Neorealisme menjelaskan kondisi sistem internasional yang berisikan upaya *struggle for power* sebagai hasil dari sebuah struktur dominan yang anarkis dengan menunjukkan dinamika relasi antarkomponen dalam sistem negara sebagai unit utama, yang masing-masing berupaya untuk selamat dalam kompetisi internasional bercirikan pola distribusi kekuasaan melalui kemampuan unit (negara) (Booth 2011). Berdasarkan argumen Booth tersebut, maka setidaknya ada empat argumen utama neorealisme, yaitu 1) penekanannya pada struktur internasional yang anarkis; 2) negara dianggap sebagai aktor utama yang berprinsip satu-kesatuan; 3) diwarnai dengan upaya masing-masing unit negara untuk mencari keselamatan diri (*survival*); 4) serta adanya arti penting pola distribusi kekuasaan yang berdasarkan kemampuan/kapabilitas masing-masing unit (negara). Waltz juga sebagai seorang tokoh neorealisme menyatakan bahwa negara yang berdaulat berhak untuk menentukan bagaimana negaranya menghadapi masalah internal dan eksternal. Setiap negara layak untuk diperjuangkan dengan nilai-nilai keamanan dan kelangsungan hidupnya, dan negara juga dapat menentukan cara yang dianggap baik dalam menentukan dan menjalankan kepentingannya (Visensio R 2016). Lalu Waltz menyatakan bahwa terdapat 'sesuatu yang besar

dan penting' dalam struktur sistem internasional yakni: (1) Negara kekuatan besar akan selalu menyeimbangkan satu sama lain. (2) Negara-negara yang berkekuatan kecil dan lemah cenderung melakukan aliansi dengan negara-negara berkekuatan besar untuk mempertahankan otonomi nya.

Waltz juga menyadari bahwa negara adalah pencari kekuasaan dan menyadari bahwa keamanan merupakan hal yang penting dan bukanlah disebabkan oleh sifat manusia akan tetapi disebabkan oleh struktur sistem internasional yang mendorong mereka melakukan hal tersebut. Neo-realis sendiri tidak menyangkal dengan adanya kemungkinan kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara karena pasti ada kepentingan yang dijunjung tinggi oleh negara tersebut (Robert Jackson 2014).

Dalam memperjuangkan kepentingan nasional nya dari tekanan sistem internasional, negara-negara akan saling mengimbangi kekuatan masing-masing (*balance of power*) baik berupa aliansi ataupun kerja sama lainnya yang sesuai dengan kepentingan nasional negaranya.

Dalam bukunya *Theory of International Politics*, Waltz menyampaikan bahwa hal bisa membuat sistem anarki stabil adalah perimbangan kekuatan (*balance of power*) (Robert Jackson 2014). *Balance of power* ini terjadi karena dua hal yakni sistem internasional yang anarki serta negara yang ada di dalam sistem anarki tersebut berusaha untuk bisa *survive*. *Balance of power* dapat dicapai dengan dua cara yakni, pertama, *internal balancing* yang meningkatkan kapabilitas ekonomi dan kapabilitas militer (Robert Jackson 2014).

Kedua, *external balancing* yang mana dilakukan melalui pembentukan aliansi untuk bisa survive dalam ruang lingkup internasional (Robert Jackson 2014)

Menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri merupakan tindakan suatu negara yang dirancang untuk memecahkan masalah atau membuat perubahan dalam suatu lingkungan. Pada umumnya, kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada.

Setiap negara memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda-beda. Hal ini bergantung pada apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. K.J. Holsti menyebutkan ada empat sifat dasar untuk menganalisis kebijakan luar negeri. Pertama, orientasi kebijakan luar negeri yaitu sifat kebijakan luar negeri yang menunjukkan sikap dan komitmen suatu negara kepada negara lain sehingga membuat kebijakan yang dianggap sebagai strategi untuk mencapai kepentingan nasional. Sifat dasar yang kedua adalah role di mana kebijakan luar negeri suatu negara mendukung negara tersebut dalam keterlibatannya di suatu hubungan internasional. Kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara sangat berkaitan erat dengan citra negara dalam menghadapi berbagai kondisi dan isu internasional. Dalam hal ini, kebijakan akan menunjukkan bagaimana posisi negara dalam suatu kondisi dan isu internasional.

Sifat dasar yang lainnya adalah goal. Kebijakan luar negeri selalu mengedepankan tujuan untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya. Maka dari itu setiap negara yang hendak menjalin kerjasama dengan negara lain akan memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Sifat dasar yang terakhir adalah action. Sifat dasar yang terakhir ini menunjukkan bahwa sifat dari kebijakan luar negeri adalah aksi atau mengambil tindakan sebagai upaya untuk mencapai atau mempertahankan suatu kepentingan nasional.

Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan dasar yang menjadi penentu dan pemandu para pembuat keputusan untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional muncul dari adanya kebutuhan suatu negara. Kondisi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan negara memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk mengejar kepentingan nasional.

Adanya kebutuhan serta terbatasnya sumber daya nasional membuat suatu negara harus mencari pemenuhan kepentingan nasionalnya dari luar batas negaranya. Kepentingan nasional suatu negara mencakup tiga hal; (a) memastikan keamanan, kedaulatan, keutuhan, dan integritas negaranya

serta memastikan keamanan warga negaranya; (b) meningkatkan kesejahteraan negara; (c) menjaga dan melestarikan ketahanan nasional. Tesis ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian dengan memfokuskan pada poin a dan b, di mana dalam penelitian ini Australia memiliki kepentingan untuk memastikan keamanan, kedaulatan, keutuhan, dan integritas negaranya serta memastikan keamanan warga negaranya. Selain itu, Australia juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan negara.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam bukunya yang berjudul *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* edisi kelima, disebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah atau isu sosial (Creswell 2018).

Metode penelitian kualitatif menekankan pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur (Creswell 2018). Dalam tahap melakukan analisis data tentunya akan disesuaikan dengan aturan yang runut, menurut Creswell terdapat langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melakukan analisis pada metode kualitatif, diantaranya adalah menyajikan data, menafsirkan data yang ada, kemudian memvalidasi, dan terakhir menunjukkan hasil penelitian (Creswell 2018). Akhir untuk penelitian ini memiliki struktur dan yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan suatu persoalan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Berdasarkan tipe tersebut akan dilakukan pengumpulan data dan fakta yang selanjutnya dianalisis dan disesuaikan terhadap isu yang dibahas. Data yang disajikan tidak berbentuk angka dari hasil survei, melainkan data yang bersumber dari literatur seperti artikel jurnal, buku, berita, maupun publikasi resmi di *website* dan wawancara. Data yang didapat dalam suatu situasi akan dikumpulkan, dikelompokkan, diinterpretasikan, dianalisis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan yang sebenarnya pada objek yang Disamping itu analisis yang dilakukan pun akan melibatkan teori-teori serta konsep dalam hubungan internasional yang akhirnya akan mendapatkan Kesimpulan.

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri karena menurut Creswell, peneliti berperan sebagai instrumen kunci (*Key as Research*) (Creswell 2018). Peneliti yang menggunakan metode penelitian kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi pelaku, atau wawancara dengan para partisipan (Creswell 2018). Peneliti dapat menggunakan protokol sejenis instrumen wawancara untuk mengumpulkan data, tetapi pada hakikatnya, peneliti itu sendiri yang sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi dan pada umumnya tidak menggunakan kuesioner atau instrumen yang dibuat oleh peneliti lain.

PEMBAHASAN

Hubungan Bilateral Persemakmuran Australia dan Tiongkok

Australia dan China harus melewati proses yang sangat panjang untuk mencapai kesepakatan agar dapat membuka hubungan diplomatik. China mensyaratkan Australia untuk mengakui *One China Policy* untuk dapat melakukan hubungan bilateral. Di sisi lain, Australia hanya akan mengakui *One China Policy* jika China mau mengakui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan pelarangan penggunaan kekerasan untuk mendapatkan kepentingan politiknya. Australia memandang bahwa melakukan hubungan bilateral dengan China penting untuk dilakukan. China dipandang mampu menjadi penyeimbang kekuatan militer dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Kedua negara terus berupaya melakukan pertemuan-pertemuan untuk

membuka hubungan diplomatik. Australia mengakui One China Policy pada Februari 1972, namun masih melakukan hubungan diplomatik dengan Taiwan sebab Australia sudah membuka kantor kedutaan besarnya di Taiwan sejak 1966. Keputusan Australia membuat China enggan berunding lebih jauh mengenai hubungan Australia dan China.

Bulan berikutnya, Australia menyampaikan keputusan untuk menormalisasi hubungan dengan China. Australia mengakui One China Policy dan China sebagai pemerintahan yang legal atas rakyat China. Selain itu, Australia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan.

Pada Desember 1972, Australia dan China secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama diplomatik di Paris. Sedangkan kerjasama ekonomi antara Australia dengan China baru dimulai pada 1978 bersamaan dengan dibukanya perekonomian China. Hubungan Australia dan China membaik pasca Perang Dingin di tahun 2000-an setelah Australia menerima eksistensi China di Indo-Pasifik. Hal ini dibuktikan dengan *Defense White Paper* 2009 dan *Defense White Paper* 2013 yang menyebutkan bahwa China bukan lagi sebuah ancaman melainkan teman dalam berhubungan antar negara.

Malcolm Turnbull merupakan Perdana Menteri Australia ke-29. Sama dengan Perdana Menteri sebelumnya, Turnbull juga berasal dari Partai Liberal. Di masa pemerintahannya, Turnbull mencoba untuk menyelaraskan kembali hubungan baik dengan China dan Amerika. Turnbull mencoba menyeimbangkan hubungan antara Australia dengan China dan hubungan antara Australia dengan Amerika Serikat. Australia membutuhkan China untuk pemenuhan ekonominya dan bergantung pada Amerika Serikat dalam hal keamanan negaranya. Hubungan ekonomi Australia dan China di masa pemerintahan Turnbull dimulai dengan berlakunya kesepakatan ChAFTA pada 20 Desember 2015. ChAFTA menjadi komitmen bagi Australia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, memperkuat daya saing serta mempromosikan peluang investasi di Australia.

China menjadi mitra terbesar Australia dalam bidang perdagangan barang dan jasa (USD 155,2 miliar pada 2016 dan meningkat 3,7% di 2017). China menjadi mitra ekspor terbesar bagi Australia dengan total ekspor USD 93 miliar pada 2016 dan bertambah menjadi USD 115 miliar pada 2017. China juga menjadi sumber impor terbesar Australia dengan total USD 62,1 miliar. Dalam hal investasi, China menjadi sumber investasi terbesar kesembilan bagi Australia. Total investasi China di Australia mengalami penurunan sebesar USD 10,508 miliar dari tahun 2015. Pada 2015 total investasi China sebesar USD 74,862 miliar, pada 2017 turun menjadi USD 64,954 miliar.

Namun, di akhir masa pemerintahannya, hubungan Australia dan China memanas. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Australia yang melarang Huawei jaringan 5G masuk ke Australia dengan alasan keamanan. Penyediaan perangkat lunak 5G dari China dikhawatirkan dapat berpotensi pada bocornya data akses, lokasi pengguna ponsel bahkan dapat menguping pembicaraan melalui sambungan telepon.

Perjanjian Kerjasama Persemakmuran Australia Dan Tiongkok Dalam Proyek Belt And Road Initiative (Bri)

Secara geografis, Australia tidak termasuk salah satu negara yang bersinggungan langsung dengan koridor-koridor BRI. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan Australia untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Pada 18 November 2014, Presiden Xi melalui pidatonya secara formal mengundang Parlemen Australia untuk berpartisipasi dalam BRI. Maret 2018, China juga menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan pemerintah Australia untuk mengajak Australia berpartisipasi dalam BRI sebagai bagian dari *Comprehensive Strategic Partnership* antara China dan Australia. Dalam beberapa kesempatan, China berusaha untuk mengundang keikutsertaan penuh Australia dalam proyek BRI.

Sebagai prasyarat untuk berpartisipasi dalam BRI, Australia harus menandatangani perjanjian bilateral dengan China sebagai komitmen keberpihakannya secara penuh pada BRI. Sebagai konsekuensinya, Australia harus mendukung kepentingan-kepentingan China dan terlibat secara diplomatis dalam upaya mensukseskan proyek-proyek BRI. Namun, Pemerintah Federal Australia belum menyatakan keberpihakannya. Hingga saat ini Australia tidak menandatangani perjanjian bilateral tersebut, melainkan hanya menjadi mitra tidak resmi. Australia mengalami peningkatan ekspor yang sangat tinggi sejak 2014. Keikutsertaan penuh Australia dalam proyek BRI berpotensi untuk meningkatkan ekspor Australia ke China.

Dalam hal investasi, China masih menjadi salah satu negara tujuan maupun sumber investasi terbesar Australia. China menduduki peringkat kesembilan setelah Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Jepang, Kanada, Kepulauan Cayman, Jerman, dan Hong Kong. Jumlah investasi Australia di China mengalami peningkatan dari tahun 2017. Sebelumnya investasi Australia ke China sebesar USD 77,099, pada tahun 2018 meningkat menjadi USD 79,200. Selain itu, China juga masih menjadi salah satu sumber investasi terbesar Australia. Tabel di bawah menunjukkan bahwa pada periode 2018-2020 China berada di peringkat 9 investor terbesar Australia setelah Belanda. Dari beberapa data diatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa Australia dan China saling ketergantungan di bidang ekonomi. Kerjasama ekonomi kedua negara tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Keikutsertaan Australia dalam proyek BRI berpotensi untuk meningkatkan perdagangannya dengan China dan menguntungkan Australia secara ekonomi.

Kedekatan Australia dengan Amerika Serikat menjadi salah satu alasan Australia belum mau menandatangani MoU perjanjian kerjasama penuh di BRI. Australia mencoba menjaga hubungan harmonisnya dengan Amerika Serikat, keikutsertaannya di BRI akan berpotensi merenggankan hubungan antara keduanya. Perdana Menteri Malcolm Turnbull menyatakan bahwa Australia menyambut baik rencana investasi China selama tidak bertentangan dengan landasan investasi Australia. Namun, Australia lebih memilih berfokus untuk bekerjasama dalam proyek strategis dan investasi tertentu daripada terlibat penuh dalam proyek BRI. Victoria, negara bagian Australia, mengambil langkah kontroversial dalam merespon tawaran kerjasama BRI. Tanpa mendapatkan persetujuan dari Canberra, pemimpin negara bagian Victoria, Daniel Andrews, dan Duta Besar China untuk Australia, Cheng Jingye, menandatangani nota kesepahaman *Memorandum of Understanding Between The Government of The State of Victoria of Australia and The National Development and Reform Commission The People's Republic of China on Cooperation Within The Framework of The Silk Road Economic Belt and The 21st Century Maritime Silk Road Initiative pada 8 Oktober 2018* (Varano 2020). Meski terdapat perbedaan latar belakang partai politik antara Pemerintah Federal Australia dengan Pemerintah Negara Bagian Victoria, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alasan atas tindakan kontroversial Victoria. Hal ini dapat terlihat dari tindakan Pemerintah Negara Bagian Queensland. Anastacia Palaszczuk, gubernur Queensland, memiliki latar belakang politik yang sama dengan Daniel Andrews. Keduanya berasal dari Partai Liberal. Namun, kebijakan Queensland dalam merespon BRI sejalan dengan Pemerintah Federal.

Keikutsertaan penuh Victoria dalam BRI tidak lepas dari hubungan kuat antara Victoria dan China yang dibangun sejak lama. Usaha Victoria untuk mengunjungi China setiap tahun mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi negara bagian Victoria. Victoria mengalami peningkatan surplus ekspor ke China, termasuk perdagangan barang dua arah hingga USD 30,7 miliar, tumbuh 60% sejak 2014. Andrews melihat BRI sebagai peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan keuangan Victoria. Bagi Victoria, China merupakan partner paling ideal untuk melakukan kerjasama di bidang infrastruktur. Kapasitas dan pengalaman kolektif China dalam proyek pembangunan infrastruktur dalam skala besar sejalan dengan agenda Victoria saat ini. Perdana

Menteri Daniel Andrews yakin keikutsertaan Victoria dalam proyek BRI mampu membuka lowongan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian Victoria. Hal ini menjadi salah satu alasan Victoria menandatangani perjanjian kerjasama BRI.

Penandatanganan perjanjian ini, meskipun kontroversial, menjadi perjanjian bersejarah dalam sejarah kerjasama Australia dan China, sebab Victoria menjadi negara bagian Australia pertama dan satu-satunya yang mencapai kesepakatan dan bergabung secara penuh dalam kerjasama BRI. Andrews juga menjadi satu-satunya pemimpin negara bagian Australia yang diundang untuk menghadiri forum BRI pada 2017. Dengan perjanjian tersebut, Victoria secara resmi terlibat langsung dengan BRI, agenda kebijakan luar negeri Presiden China Xi Jinping. Perjanjian tersebut bertujuan untuk mempromosikan konektivitas kebijakan, infrastruktur, perdagangan, keuangan dan sumber daya manusia untuk mencari peluang baru dalam kerjasama dan menjadi momentum baru. Selain itu, Victoria dan China juga sepakat untuk menciptakan kebijakan yang dapat membantu pertumbuhan kerjasama investasi dan bisnis untuk kedua belah pihak. Namun, dilain sisi, Kebangkitan China di kawasan Pasifik menimbulkan kekhawatiran bagi Australia. China tercatat sebagai pendonor terbesar di Pasifik setelah Australia dan Amerika Serikat. Pendanaan China kepada negara-negara Pasifik ditujukan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, rel kereta, pelabuhan, dll melalui proyek BRI. Pendanaan ini merupakan utang dengan suku bunga yang tinggi dengan jaminan aset lokal atau sumber daya alam jika suatu negara tidak dapat melakukan pembayaran utang saat jatuh tempo.

Keikutsertaan penuh Victoria dalam proyek BRI dapat dikatakan sebagai representasi kehadiran Australia di BRI. Hal ini menjadi kontroversial sebab keputusan yang diambil Victoria mengabaikan kepentingan nasional Australia. Kekhawatiran terbesar Australia adalah meningkatnya kekuatan militer China di Pasifik seiring dengan kebangkitan ekonominya. Dalam upaya pengamanan proyek-proyek pembangunannya, China kerap mengalokasikan kekuatan militer di jalur BRI. Pengalokasian militer China juga seringkali didasarkan atas konsekuensi jebakan hutang yang diberikan dalam pembangunan proyek BRI (Adam 2018).

Selain itu, pada Februari 2018 Australia telah bergabung dengan Amerika Serikat, India dan Jepang untuk membuat skema inisiatif baru untuk menghubungkan Kawasan Indo-Pasifik sebagai upaya menekan pengaruh China di Kawasan tersebut.⁸³ Inisiatif Blue Dot Network (BDN) pertama kali diluncurkan di Forum Indo-Pasifik pada November 2019. BDN merupakan sebuah inisiatif multi-sektor untuk menyatukan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mempromosikan pengembangan infrastruktur dengan standar kualitas tinggi. BDN dapat dikatakan sebagai proyek alternatif Australia untuk menekan pengaruh China terutama di kawasan Indo-Pasifik.

Di Tahun 2019, kerjasama Victoria dan China dalam proyek BRI semakin kuat setelah kedua belah pihak menandatangani *Framework Agreement Between The Government of The State of Victoria of Australia and The National Development and Reform Commission The People's Republic of China on Jointly Promoting The Silk Road Economic Belt and The 21st Century Maritime Silk Road Initiative*. Kerjasama ini membantu Victoria untuk mempercepat peluang perdagangan dan investasi di BRI, membantu meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja di Victoria.⁸⁶ Dalam pertemuan meja bundar ke Beijing, pemimpin negara bagian Victoria, Daniel Andrews memperkenalkan pembangunan besar proyek pipa infrastruktur senilai AUD 80 miliar (USD 55 miliar) ke sejumlah perusahaan konstruksi China. Proyek-proyek tersebut termasuk *North East Link, Metro Tunnel, West Gate Tunnel, Melbourne Airport Rail Link* dan *Suburban Rail Loop*. Untuk yang kedua kalinya, Victoria menandatangani perjanjian kerjasama BRI tanpa berkonsultasi dengan Pemerintah Federal Australia. Juru bicara Departemen Luar Negeri dan

Perdagangan Australia mengatakan bahwa Victoria baru memberi tahu departemen di hari ketika perjanjian kerangka kerja tersebut ditandatangani dan diumumkan ke publik.

Hal ini semakin menambah kekhawatiran Pemerintah Federal Australia, kesepakatan Victoria dan China dapat mendorong Victoria terlibat dalam kesepakatan BRI di negara-negara Pasifik. Dengan demikian, negara-negara kepulauan akan masuk lebih dalam dan sulit keluar dari jebakan utang China. Selain itu, di tahun yang sama Pemerintah Federal Australia bersama Amerika dan sekutunya secara resmi meluncurkan BDN sebagai tandingan BRI di kawasan Indo-Pasifik. Hal utama yang disoroti BDN terhadap BRI adalah jebakan utang dengan bunga yang tinggi yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan nasional suatu negara. Selain itu, proyek infrastruktur yang dibangun oleh China memiliki kualitas di bawah standar sehingga mengurangi umur ideal suatu infrastruktur. Hal ini mengakibatkan negara penerima harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk melakukan perbaikan. Dalam upaya menjaga kepentingannya, China juga memasukkan komponen teknologi yang pemeliharaan dan pengoperasiannya sulit dilakukan oleh negara penerima bantuan, sehingga negara tersebut harus bergantung dengan China untuk pemeliharaan dan pengoperasiannya. Pada dasarnya, inisiatif BDN adalah sebuah visi tentang bagaimana seharusnya infrastruktur global. Infrastruktur dengan kualitas tinggi dan transparan. Sikap kontroversial Victoria membuat Pemerintah Federal Australia mencari cara lain untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dan menjaga hubungan baiknya dengan mitra BDN. Australia harus mencari power baru agar dapat memveto atau membatalkan kesepakatan Victoria dalam proyek BRI. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Scott Morrison, Australia membuat Undang-Undang baru Australia's Foreign Relations (*State and Territory Arrangements*) Act 2020.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat antara pemerintah negara bagian atau teritori (dan entitas mereka) dan entitas asing tidak berdampak buruk terhadap hubungan luar negeri Australia dan tidak bertentangan dengan kebijakan luar negeri Australia Undang-undang baru tersebut mengatur negara bagian atau teritori untuk memberitahu dan meminta persetujuan dari Menteri Luar Negeri jika negara bagian atau teritori akan melakukan negosiasi, atau memasuki, atau telah memasuki suatu perjanjian internasional.

Selain itu, Menteri Luar Negeri berhak menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, mengubah atau membatalkan perjanjian apapun yang tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional Australia. Wewenang ini berlaku pada perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dan perjanjian yang tidak mengikat secara hukum.

Alasan Persemakmuran Australia Dalam Pembatalan Perjanjian Kerjasama Proyek Bri Dengan Tiongkok

Teori Kebijakan Luar Negeri mencoba menjawab penelitian ini melalui faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi Australia dalam membuat kebijakan luar negerinya. Penelitian ini memfokuskan pada kebutuhan ekonomi dan keamanan Australia sebagai faktor internal, serta kebijakan dan tindakan aktor lain sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kebijaka luar negeri Australia dalam membatalkan kerjasama BRI.

Faktor Internal

Menurut KJ. Holsti, kebijakan luar negeri adalah sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada. Salah satu yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara adalah faktor internal. Dalam penelitian ini, faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia adalah faktor ekonomi dan keamanan. Stabilitas ekonomi dan kemampuan Australia dalam menjalankan investasi serta kerjasama merupakan faktor yang dapat membentuk kesejahteraan ekonomi juga keamanan

nasional Australia. Keamanan nasional dapat tercapai ketika pengamanan jalur laut yang menjadi jalur ekonomi aman tanpa adanya hambatan dari aktor lain. Australia menempatkan keamanan nasional sebagai prioritas utama kepentingannya. Dengan prioritas ini, Australia harus memastikan upaya pengamanan negaranya melalui jalur darat, laut, dan udaranya. Selain itu, Australia juga harus memastikan hubungan dengan negara-negara tetangganya seperti Timor Leste, Indonesia, dan Papua Nugini dalam keadaan aman dan stabil sehingga negara-negara tersebut tidak menjadi ancaman bagi Australia.

Keikutsertaan Victoria dalam dua perjanjian kerjasama BRI dengan China tidak sejalan dengan upaya yang dilakukan Australia untuk menjaga keamanan nasionalnya. Sehingga keterlibatan Victoria dalam proyek kerjasama BRI mendorong Pemerintah Federal Australia untuk membuat kebijakan luar negeri guna melindungi keamanan nasionalnya.

Dalam rangka menjaga keamanan nasionalnya, Parlemen Federal Australia membentuk Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang baru. Undang-Undang ini bertujuan agar perjanjian internasional yang dilakukan oleh Negara Bagian atau Otoritas Wilayah konsisten dengan kebijakan luar negeri Australia. Selain itu, Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yang baru juga memberikan wewenang kepada Menteri Luar Negeri untuk mengubah atau membatalkan perjanjian yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Australia. Skema Undang-Undang Hubungan Luar Negeri baru tersebut mencakup berbagai sektor termasuk infrastruktur, kerjasama perdagangan, pariwisata, budaya, ilmu pengetahuan, kesehatan dan pendidikan, termasuk kemitraan penelitian universitas.

Faktor Eksternal

Keikutsertaan Australia dalam Blue Dot Network, Menurut KJ. Holsti, kebijakan luar negeri adalah sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada.¹²⁶ Salah satu kebijakan Australia untuk mencapai tujuan nasionalnya adalah melakukan pembatalan terhadap kerjasama proyek Belt and Road Initiative (BRI) pada 2021.

Menurut Holsti, salah satu yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri suatu negara adalah faktor eksternal. Dalam penelitian ini, faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia adalah oleh kebijakan dan tindakan aktor lain. Kebijakan luar negeri Australia dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri China terkait dengan perluasan pengaruh di kawasan Indo-Pasifik melalui BRI. Meningkatnya peran China di Indo-Pasifik mendorong Australia dan negara-negara sekutunya untuk membuat strategi baru guna menekan pengaruh China di kawasan ini.

Peran China juga memunculkan kritik jebakan utang yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi serta rendahnya kualitas infrastruktur yang dimiliki BRI. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan instabilitas ekonomi Australia dan negara Pasifik lainnya.

Salah satu tindakan aktor lain yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat mengajak Australia untuk bergabung dalam skema inisiatif baru untuk membangun infrastruktur yang lebih berkualitas guna menghubungkan kawasan Indo-Pasifik dan menekan pengaruh China di kawasan ini

Inisiatif baru ini pertama kali diluncurkan di Forum Indo-Pasifik pada November 2019 dengan nama Blue Dot Network (BDN). Australia secara resmi menandatangani Blue Dot Network (BDN) pada Februari 2018.¹³⁰ Salah satu tujuan Australia bergabung dalam BDN adalah untuk membangun program *Pacific Step-Up* yang menjadi salah satu prioritas terbesar kebijakan luar negeri Australia. Program *Pacific Step-Up* merupakan pendekatan tradisional yang digunakan Australia untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan. Dalam program ini, Australia menggabungkan unsur-unsur soft power dan hard power dan berfokus pada pengembangan ekonomi, politik, dan budaya di kepulauan Pasifik. BDN menjadi komitmen Australia untuk

melakukan upaya yang sama kuat dengan China guna memperkuat pengaruh dan hubungannya dengan negara- negara di kawasan Indo-Pasifik.

Pada dasarnya, inisiatif BDN adalah sebuah visi tentang bagaimana seharusnya infrastruktur global. Infrastruktur dengan kualitas tinggi dan transparan. Perbedaan utama antara BDN dan BRI adalah BDN tidak menyediakan pendanaan seperti berinvestasi BRI.

BDN akan menetapkan segel persetujuan yang diakui secara global untuk proyek-proyek infrastruktur besar. BDN melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan visi bersama tentang investasi infrastruktur yang berkualitas, inklusif, transparan, dan efisien secara ekonomi, layak secara finansial, tangguh, berkelanjutan secara lingkungan dan sosial.

Kepentingan Nasional Persemakmuran Australia

Pada dasarnya, berbagai dinamika hubungan bilateral dapat dilihat dari kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional menurut Jack C. Plano dan Roy Olton adalah tujuan dasar yang menjadi penentu dan pemandu para pembuat keputusan untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Australia sebagai hegemon di kawasan Indo-Pasifik memiliki banyak kepentingan di kawasan. Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan luar negeri Australia menempatkan perhatian lebih pada kawasan Indo-Pasifik. Hegemoni Australia di kawasan Indo-Pasifik dapat dilihat dari ketergantungan kawasan terhadap bantuan yang diberikan oleh Australia. Australia tercatat sebagai pendonor terbesar di kawasan dengan total USD 1,4 miliar pada periode 2019-2020.

Berdasarkan data dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, bantuan terbesar Australia diberikan kepada Papua Nugini sebesar USD 607,5 juta, kemudian di peringkat kedua diisi oleh kepulauan Solomon sebesar USD 174.4 juta, dan di peringkat ketiga Vanuatu sebesar USD 66,2 juta. Bantuan yang diberikan Australia bertujuan untuk negara-negara di kawasan Indo-Pasifik mandiri dalam perekonomian dan keamanan negaranya. Australia juga mendukung berbagai upaya pengembangan hukum, manajemen ekonomi, serta pengamanan perbatasan melalui berbagai program kerjasama baik bilateral maupun regional. Bantuan tersebut merupakan bagian dari kepentingan Australia terhadap kekayaan sumber daya alam yang ada di kawasan Indo-Pasifik. Kepentingan Australia terlihat di beberapa negara. Salah satunya di Blok Migas Greater Sunrise di Timor Leste yang terletak di 150 km dari garis pantai tenggara Timor Leste dan 450 km wilayah barat laut Darwin Australia. Ladang migas ini memiliki potensi cadangan minyak senilai USD 50 Miliar. Kekayaan tersebut membuat Australia berusaha untuk memiliki lisensi untuk mengeksplorasi ladang minyak tersebut.

Sebagai sebuah kawasan yang sangat strategis dan dinamis, kawasan Indo- Pasifik sering kali menjadi rebutan banyak negara untuk memperluas hegemoninya. Kekuatan ekonomi China terus meningkat dengan kehadiran BRI di kawasan Indo-Pasifik. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi Australia sebagai hegemon di kawasan. Kehadiran BRI bukan hanya menjadi ancaman ekonomi, namun juga menjadi ancaman keamanan bagi Australia.

Dalam rangka mengupayakan kepentingan nasionalnya, Australia memutuskan untuk bergabung dengan Blue Dot Network, inisiatif buatan Amerika Serikat sebagai tandingan proyek BRI China di kawasan Indo-Pasifik Tujuan keikutsertaan Australia adalah untuk menekan pengaruh China serta meningkatkan program Pacific Step-Up. Keikutsertaan negara bagian Victoria dalam proyek BRI faktanya tidak sejalan dengan Pemerintah Federal Australia yang justru ingin menyaingi BRI melalui BDN. Sehingga Australia harus memiliki power baru untuk membatalkan keikutsertaan Victoria di BRI untuk menjaga kepentingan nasionalnya.

Plano dan Olton melihat faktor keamanan dan ekonomi sebagai tujuan awal pembatalan Australia terhadap kerjasama BRI yang dilakukan oleh negara bagian Victoria. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebangkitan China melalui kehadiran BRI di kawasan Indo-Pasifik membuat

negara-negara di kawasan ini terjebak utang dengan bunga tinggi yang sulit untuk dilunasi dalam tempo waktu yang sudah ditentukan. Jebakan utang China dapat menyebabkan instabilitas kawasan yang dapat mengancam kepentingan Australia.

Dalam hal ini, kepentingan nasional Australia terbentuk atas dasar keamanan dan meningkatkan kesejahteraan negaranya. Dalam rangka melindungi kepentingan nasionalnya, Australia membuat Undang-Undang Hubungan Luar Negeri baru. Undang-undang yang baru ini memberi wewenang kepada Pemerintah Federal untuk mengubah atau membatalkan suatu perjanjian yang dilakukan oleh negara bagian atau otoritas wilayah dengan entitas asing, jika perjanjian tersebut tidak konsisten dengan kepentingan nasional Australia.

Implementasi kepentingan nasional Australia dalam kebijakan luar negeri adalah pembatalan perjanjian kerjasama BRI yang disepakati oleh negara Victoria dan China pada tahun 2021. Jadi, pembatalan Australia terhadap perjanjian kerjasama BRI yang disepakati oleh Victoria dan China disebabkan oleh faktor kepentingan nasional dalam bidang keamanan dan kesejahteraan negara. Implementasi kepentingan nasional Australia dilaksanakan melalui kebijakan luar negeri Australia yang mengedepankan keamanan dan kesejahteraan Australia.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Presiden Xi Jinping mengenalkan OBOR atau yang sekarang dikenal dengan BRI pada 2013. BRI merupakan ambisi besar Presiden Xi Jinping untuk menghidupkan kembali jalur sutra kuno dan meningkatkan kerjasama dengan Afrika, Eropa, Timur Tengah, serta Asia Selatan, Tengah dan Tenggara.

China membentuk enam koridor internasional dan jalur sutra maritim untuk menjalankan misi BRI. Secara geografis, Australia tidak termasuk ke dalam salah satu koridor yang dilalui proyek BRI. Namun, untuk meningkatkan perannya di Kawasan Indo-Pasifik China secara resmi mengundang Australia untuk bergabung dalam proyek BRI.

Kebangkitan China di kawasan Indo-Pasifik justru menjadi ancaman bagi Australia. Selain karena ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik, Australia juga khawatir utang yang diberikan China pada kawasan tersebut dapat menyebabkan destabilisasi kawasan. China memberikan pinjaman dana untuk pembangunan proyek infrastruktur dengan bunga yang sangat tinggi. Tingginya suku bunga yang ditetapkan dikhawatirkan dapat menyebabkan negara penerima sulit membayar dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

China juga kerap mengalokasikan militernya sebagai upaya pengamanan pembangunan proyek infrastruktur, tidak jarang pengalokasian militer ini juga menjadi konsekuensi yang harus ditanggung suatu negara jika gagal melakukan pembayaran utang ketika sudah jatuh tempo. Untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya, Australia menolak tawaran China untuk bergabung dalam proyek BRI. Australia justru bergabung dalam BDN, inisiatif baru tandingan BRI, bersama Amerika Serikat, Jepang dan India.

BDN mengkritik ketidaktransparanan BRI dalam mengelola proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, BDN menganggap pendanaan proyek infrastruktur tersebut membuat suatu negara ketergantungan dengan China. Hal ini disebabkan kualitas infrastruktur yang tidak sesuai standar sehingga umur infrastruktur lebih pendek dari yang seharusnya, sehingga negara tersebut harus melakukan perbaikan dan pengeluaran menjadi lebih besar. China juga memasukkan komponen teknologi yang pemeliharaan dan pengoperasiannya sulit dilakukan oleh negara penerima bantuan, sehingga negara tersebut harus bergantung dengan China untuk pemeliharaan dan pengoperasiannya.

Victoria, salah satu negara bagian Australia, secara diam-diam mengambil langkah kontroversial. Di bawah kepemimpinan Daniel Andrews, Victoria secara resmi menandatangani MoU kerjasama BRI pada 2018. Di tahun berikutnya, Victoria dan China memperkuat kerjasama tersebut dengan penandatanganan kerangka kerja. Kedua perjanjian yang dibuat Victoria dengan China dilakukan tanpa berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Canberra. Tindakan Victoria telah melangkahi pemerintah federal Australia dalam mengambil kebijakan luar negeri. Hal ini membuat pemerintah federal mengambil keputusan untuk membuat Undang-Undang Hubungan Luar Negeri baru yang memungkinkan pemerintah federal mengubah atau membatalkan suatu perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara bagian atau otoritas wilayah dengan entitas asing jika perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Australia.

Dengan demikian, dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang membuat Australia membatalkan perjanjian BRI dengan China. Pertama, ancaman militer China di kawasan Indo-Pasifik. Kedua, keikutsertaan Australia dalam BDN. Ketiga, disahkannya *Australia's Foreign Relations (State and Territory Arrangements) Act 2020*, sehingga Menteri Luar Negeri memiliki wewenang untuk mengubah atau mengakhiri perjanjian internasional yang dibuat oleh negara bagian atau otoritas wilayah dengan entitas asing jika perjanjian tersebut tidak konsisten dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Australia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mearsheimer, J. J. 2011. *Tragedy of Great Power Politics*. New York: W.W Norton & Company.
- Robert Jackson, G. S. 2014. *Neorealisme*. In G. S. Robert Jackson, *Pengantar Studi Hubungan Internasional - Teori dan Pendekatan (Edisi Kelima)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Secretariat Cairo. 1995. "United Nation Congress On The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders."

Internet

- Abou-Zahr, Sawssan. 2019. *Peace Dispatch: March 2019*. Maret 23. Accessed Januari 27, 2024. <https://www.peaceinsight.org/en/articles/peace-dispatch-march-2019/?location=nigeria&theme=conflict-prevention-early-warning>.
- Adam, Chaesar. 2018. *Respon Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok: Dilema Pemenuhan Kepentingan Ekonomi dan Keamanan Nasional*. Yogyakarta: UGM.
- Aoyama, Rumi. 2017. "One Belt, One Road: Tiongkok's New Global Strategy." *Journal of Contemporary East Asia Studies* Vol 5:2.
- Booth, K. 2011. *Realism and World Politics*. London: Routledge.
- Chun, Chieng-Peng. 2010. *Tiongkoks's Multilateral Cooperation In Asia and the Pacific: institutionalizing 'Good Neighbor Policy'*. Accessed 2024. <https://www.routledge.com/Tiongkoks-Multilateral-Co-operation-in-Asia-and-the-Pacific-Institutionalizing/Chung/p/book/9780415690355>.
- Creswell, J. W. 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches - Fifth Edition (p. 333)*. Los Angeles: Sage Publish.

- Dupree, Louis, Nancy Hatch Dupree, and Victor Petrov. 2024. *Afghanistan; Ethnolinguistic Composition*. Januari 12. Accessed Januari 27, 2024. <https://www.britannica.com/place/Afghanistan>.
- Hartono, Willy. 2021. *Perjanjian AS-Taliban Buka Jalan Perdamaian di Afghanistan*. Maret 1. Accessed Januari 29, 2024. <https://www.medcom.id/internasional/timur-tengah-afrika/yNLGE06K-perjanjian-as-taliban-buka-jalan-perdamaian-di-afghanistan>.
- International Crisis Group. 2020. *Afghanistan Peace Talk Since 2018: A Timeline*. Agustus 11. Accessed Januari 30, 2024. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/afghanistan-between-february-2019-and-august-2020-timeline>.
- Katzman, Kenneth, and Clayton Thomas. 2017. *Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and US Policy*. Washington DC: Congressional Research Service.
- Kementerian Sekretaris Negara. 2021. *Indonesia-Afghanistan Sepakat Tingkatkan Kerjasama*. April 6. Accessed Januari 29, 2024. <https://www.setneg.go/>.
- Margesson, Rhoda. 2010. *United Nations Assistance Mission in Afghanistan : Background and Policy Issue*. Washington DC: CSR Report for Congress.
- Sinaga, Yuni Arisandy. 2019. *Indonesia Siap Berkontribusi Proses Perdamaian di Afghanistan*. Maret 15. Accessed Januari 30, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/810347/indonesia-siap-berkontribusi-proses-perdamaian-diafghanistan#>.
- Tanner, Stephen. 2002. *Afghanistan : A Military History From Alexander the Great ti the fall of the Taliban*. Cambridge: Da Capo Press.
- UNAMA. n.d. *Knowledge Portal*. Accessed January 29, 2024. <http://www.un.spider.org>.
- UNODC. 2022. *"Transnational organized crime: the globalized illegal economy : Global Threats, Local Effects"*. <https://www.unodc.org/toc/en/crimes/organized-crime.html>.
- UNSCR. 2001. *Resolution 1378 The Solution in Afghanistan*. Accessed January 28, 2024. <http://unscr.com/en/resolution/1378>.
- Varano, John. 2020. *The State of Victoria and China's Belt and Road Initiative: Where Does it Leave Victorians?.*. Accessed 2024. https://www.researchgate.net/publication/341359556_The_State_of_Victoria_and_China's_Belt_and_Road.
- Visensio R. 2016. *Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif KlasiK)*. Surabaya, Jawa Timur: Cakra Studi Global Strategis (CSGS) - Universitas Airlangga Surabaya.
- Widyaningrum, Gita Laras. 2018. *Kronologis Serangan 9/11, Runtuhnya Menara Kembar dan Osama Bin Laden*. September 18. Accessed Januari 28, 2024. <https://nationalgeographic.grid.id/read/13935227/kronologis-serangan-911-runtuhnya-menara-kembar-dan-osama-bin-laden>.